

2019

KECAMATAN
KIARAONDONG



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) KECAMATAN KIARAONDONG

Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Kecamatan Kiaracondong



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah yang terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kiaracondong setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan





Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan serta penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong tidak terlepas dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tahun 2019.

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Kiaracondong yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunannya dilakukan melalui 4(empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan Bottom - Up, (3) Pendekatan Top - Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah.

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2019 merupakan rencana tahunan pada masa transisi, dimana dokumen RPJMD Kecamatan Kiaracondong tahun 2013 - 2018 telah habis masa berlakunya, sedangkan RPJMD periode 2019 - 2023 belum disusun. Oleh karena itu, salah satu untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang





belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD maka RKPD masa transisi ini merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berikutnya.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2019.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juli 2018

Camat Kiaracondong





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2018	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Kiaracondong	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kiaracondong	52
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	72
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	77
BAB V PENUTUP	91





DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Kiaracondong) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Kecamatan Kiaracondong) s/d Tahun 2018	21
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung	51
2.3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung	58
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Bandung	69
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Bandung	81

DAFTAR GAMBAR

1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.....	2
-----	--	---

GEMAH RIPA WIBAWA MUKTI





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

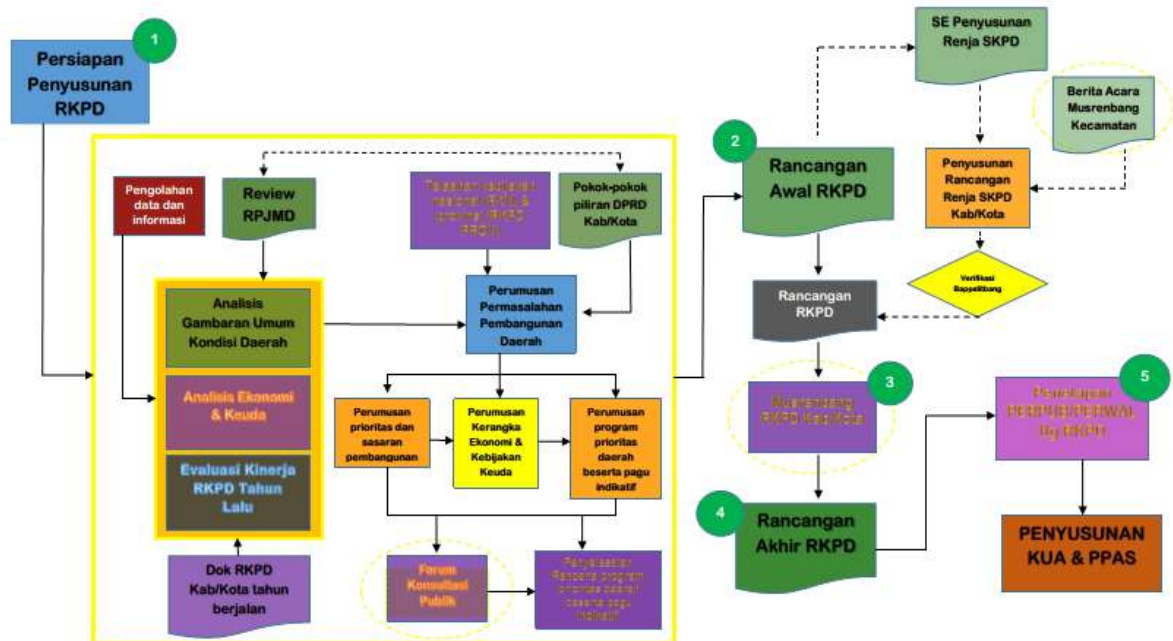
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan

proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2019-2023. RKPD Kecamatan Kiaracondong disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Secara garis besar tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :

- a. Tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup :
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala



Bappelitbang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- c. Rancangan awal RKPD dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan
- b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan



kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up)* dan *atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga

tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif*, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2019 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2019 - 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2019 harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2019 menjadi lebih transparan dalam



proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.





1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RKPD Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);



21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08 Noreg. Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat: (8/294/2016));
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 01);
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkup Pemerintah Kota Bandung.
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

1. Membuat dokumen rencana kerja pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2019 yang merupakan penjabaran RPJMD Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2019 – 2023, dan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2019.
3. Sebagai bahan pengendalian, evaluasi kegiatan, dan pengukuran tingkat kinerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD khususnya di Kecamatan Kiaracondong Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Kiaracondong

Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 08/VI-Kec.Kircon Tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis



Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) indikator adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kiaracondong	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Bersamaan dengan Reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2017 :

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2017

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 23.513.864.500,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 21.004.204.338,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,33 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.509.660.162,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2017

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	13.224.998.726	11.458.033.428	86,64
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	10.288.865.774	9.546.170.910	92,78
	Jumlah	23.513.864.500	21.004.204.338	89,33

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :



**PROGRAM,KEGIATAN,PAGU ANGGARAN, REALISASI SERTA
OUTPUT KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2017**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.649.375.696	2.133.163.198		80,52
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	319.182.279	149.214375	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	46,75
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	118.273.100	95.556.708	jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	80,79
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	309.270.600	231.090.400	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	74,72
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.578.000	25.113.250	Jumlah kegiatan jasa perbaikan	94,49
		Penyediaan alat tulis kantor	113.362.288	111.448.290	Jumlah kegiatan pengadaan ATK	98,31
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	135.154.852	134.024.925	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	99,16
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.960.444	25.071.180	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	96,57
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	489.694.290	459.362.220	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	93,81
		Penyediaan peralatan rumah tangga	75.598.843	59.908.900	Jumlah kegiatan pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga	79,25
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	85.843.000	71.656.000	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan	83,47
		Penyediaan makanan dan minuman	244.543.000	133.516.350	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	54,60



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65.715.000	36.327.600	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,31
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	493.800.000	492.765.000	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	99,79
		Penyediaan jasa pengamanan kantor	146.400.000	108.108.000	Jumlah kegiatan pengadaan jasa pengamanan kantor	73,84
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.181.845.929	981.865.750		83,08
		Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	47.914.900	Jumlah jasa konsultan FS	95,83
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	29.950.000	25.300.000	Jumlah kegiatan pengadaan kendaraan dinas	84,47
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.030.460	25.080.000	Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan gedung	78,30
		Pengadaan Mebeulair	45.394.800	38.225.000	Jumlah pengadaan mebeulair	84,21
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	66.901.185	64.290.000	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung	96,10
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	542.536.100	370.789.000	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	68,34
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	415.033.384	410.266.850	Jumlah kegiatan rehabilitasi kantor	98,85
III	Program peningkatan disiplin aparatur		213.935.500	147.350.500		68,88
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	53.800.000	41.772.500	Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu	77,64
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	160.135.500	105.578.000	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap	65,93





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

IV	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		9.179.841.601	8.195.653.980		89,28
		Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	48.759.000	32.782.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Perekonomian masyarakat Se-Kecamatan	67,23
		Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	1.101.399.200	978.176.850	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	88,81
		Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.437.027.560	3.108.960.880	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90,45
		Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	681.020.000	534.645.850	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Se-Kecamatan	78,51
		Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	3.456.060.989	3.225.664.100	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	93,33
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	60.635.000	32.015.500	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52,80
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	394.939.852	283.408.800	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat se Kecamatan	71,76
V	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan		10.288.865.774	9.546.170.910		92.78





	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	8.500.660.690	7.843.342.380	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	92,27
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	599.060.016	579.576.475	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	96,75
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	592.195.935	566.158.000	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	95,60
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	596.949.133	557.094.055	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	93,32
JUMLAH		23.513.864.500	21.004.204.338		89,33

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua, untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Kiaracondong) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Kecamatan Kiaracondong) s/d Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	5	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	19 unit	*	19 unit	19 unit	100,00 %	19 unit	19 unit	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	12 bulan	*	12 bulan	10 bulan	83,33 %	12 bulan	12 bulan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	46 unit	*	23 unit	21 unit	91,30 %	46 unit	46 unit	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kegiatan pengadaan ATK	61 paket	*	83 paket	83 paket	100,00 %	61 paket	61 paket	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	64 paket/jenis	*	116 paket/jenis	116 paket/jenis	100,00 %	64 paket/jenis	64 paket/jenis	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah kegiatan pengadaan	19 paket/jenis	*	29 paket/jenis	29 paket/jenis	100,00 %	19 paket/jenis	19 paket/jenis	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/ penerangan								
	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kegiatan pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga	63 paket/jenis	*	92 paket/jenis	73 paket/jenis	79,35 %	63 paket/jenis	63 paket/jenis	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	12 bulan	12 bulan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 laporan	*	7 laporan	7 laporan	100,00 %	5 laporan	5 laporan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah kegiatan pengadaan jasa pengamanan kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pembelian perlengkapan gedung kantor	1 paket	*	3 paket	2 paket	66,67 %	1 paket	1 paket	100,00 %
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 paket	*	4 paket	3 paket	75,00 %	4 paket	4 paket	100,00 %
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Program peningkatan disiplin aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap	4 laporan	*	1 laporan	1 laporan	100,00 %	4 laporan	4 laporan	100,00 %
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu	2 laporan	*	3 laporan	3 laporan	100,00 %	2 laporan	2 laporan	100,00 %
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	5	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,09	83,00	83,11	100,13 %	85,00	85,00	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi perekonomian masyarakat Se-Kecamatan	12 laporan	*	*	*	-	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi kualitas kehidupan kemasyarakatan Se-Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat tingkat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi infrastruktur dan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	kecamatan dan kelurahan Peningkatan kualitas penanganan ketentrangan dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	lingkungan hidup Se-Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi ketentrangan dan ketertiban Se-Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	8 laporan	66,67 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Se-Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	10 laporan	83,33 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Se-Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7 laporan	58,33 %	12 laporan	12 laporan	100,00 %
	Program Inovasi Pembangunan dan	Tingkat Pemberdayaan	80,00	*	75,00	79,77	106,36 %	80,00	91,01	113,76 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pemberdayaan Kewilayahan	Lembaga Kemasyarakatan								
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW	255	*	255			255	255	100,00 %
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK	24	*	24			24	24	100,00 %
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna	24	*	24			24	24	100,00 %
	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM	18	*	18			18	18	100,00 %





2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, hal tersebut berdasarkan pada lampiran keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung nomor 138/05 - Kec.Kircon Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penjelasan formulasi/cara pengukuran disesuaikan dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dimana terdapat 14 (empat belas) komponen yang menjadi nilai unsur pelayanan sebagai indikator penilaian di masing-masing wilayah.

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 indikator dengan 14 komponen yang menjadi nilai unsur per pelayanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan



- b. Persyaratan pelayanan
- c. Kejelasan petugas pelayanan
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan
- e. Tanggungjawab petugas pelayanan
- f. Kemampuan petugas pelayanan
- g. Kecepatan pelayanan
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan
- i. Kesopanan dan keramahan petugas
- j. Kewajaran biaya pelayanan
- k. Kepastian biaya pelayanan
- l. Kepastian jadwal pelayanan
- m. Kenyamanan lingkungan
- n. Keamanan pelayanan

Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dimana yang menjadi formulasi/cara pengukurannya berdasarkan persentase rata-rata RW Juara, Siskamling Aktif dan LKK Aktif. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas 3 unsur yang menjadi kriteria penilaian.

Kriteria unsur penilaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :

- a) Persentase RW Juara
- b) Siskamling Aktif
- c) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif



Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83,11	100,13
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	79,77	106,35
Rata-rata Capaian Kinerja					103,24

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,13% dan pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 106,35%.

Dari 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,11 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,11 point yaitu 100,13 % atau melebihi target yang diperjanjikan.



**Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83,11	100,13
Rata-rata Capaian Kinerja					100,13

Pencapaian hasil kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari 14 (empatbelas) komponen unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Kiaracondong dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Kiaracondong.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong selama tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

**Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2017**

No	KOMPONEN	UNSUR	NILAI UNSUR
1	Prosedur pelayanan	U 1	3,38
2	Persyaratan pelayanan	U 2	3,40
3	Kejelasan Petugas pelayanan	U 3	3,40
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	U 4	3,40
5	Tanggungjawab petugas pelayanan	U 5	3,42
6	Kemampuan petugas pelayanan	U 6	3,42
7	Kecepatan pelayanan	U 7	3,25
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	U 8	3,34
9	Kesopanan dan keramahan petugas	U 9	3,37
10	Kewajaran biaya pelayanan	U 10	3,29
11	Kepastian biaya pelayanan	U 11	3,25



12	Kepastian jadwal pelayanan	U 12	3,28
13	Kenyamanan lingkungan	U 13	3,31
14	Keamanan pelayanan	U 14	3,34
	Nilai rata-rata tertimbang		3,35

Sumber : Kecamatan Kiaracondong

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada kecepatan pelayanan karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah kemampuan petugas pelayanan harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kategori tertinggi dan terendah hasil IKM tahun 2017 di Kecamatan Kiaracondong yaitu :

1. Nilai kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur Kemampuan Petugas Pelayanan, Tanggungjawab Petugas Pelayanan, dan Kedisiplinan Petugas Pelayanan.
2. Nilai kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur Kecepatan Pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Kedisiplinan petugas pelayanan dalam waktu memulai aktivitas bekerja.
2. Tanggungjawab petugas pelayanan dalam melayani kepentingan dan keperluan masyarakat.
3. Keramahan dan pengetahuan petugas yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. .
4. Tersediannya ruang tunggu yang nyaman dimana masyarakat dapat dengan langsung mengawasi kondisi sekitarnya.
5. Terpenuhinya sarana dan sarana yang memadai untuk kepentingan pelayanan publik yang prima.



Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (kecepatan pelayanan) sebagai berikut :

1. SPP (Standar Prosedur Pelayanan) belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Kiaracondong.
2. Pelayanan yang dilakukan di Kecamatan masih berkoordinasi dengan instansi lain, sehingga ini menjadi kendala bagi kecamatan menentukan standar waktu pelayanan dari setiap produk pelayanan yang dijanjikan.
3. SOP (Standart Operasional Prosedur) yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, belum mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

2. Pencapaian Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Hasil kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar 79,77 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 4,77 point yaitu 106,35 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	79,77	106,35
Rata-rata Capaian Kinerja					106,35



Pencapaian hasil kinerja pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat dari 3 (tiga) kriteria unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Kiaracondong dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Kiaracondong. Ketiga kriteria tersebut diantaranya RW Juara, Siskamling Aktif, dan LKK Aktif.

Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Kiaracondong selama tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

**Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2017**

WILAYAH	KRITERIA							TPM
	RW JUARA			SISKAMLING AKTIF		LKK AKTIF		
	JML RW	JUARA	%	JML	%	JML	%	
BABAKAN SARI	18	18	100,00	17	94,44	3	75,00	89,81
BABAKAN SURABAYA	15	12	80,00	15	100,00	3	75,00	85,00
KEBON KANGKUNG	11	11	100,00	10	90,91	3	75,00	88,64
SUKAPURA	15	11	73,33	14	93,33	3	75,00	80,56
CICAHEUM	12	8	66,67	10	83,33	3	75,00	75,00
KEBON JAYANTI	14	2	14,29	12	85,71	3	75,00	58,33
TOTAL	85	62	72,88	78	91,44	18	75,00	79,77

Sumber : Kecamatan Kiaracondong



Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada RW Juara karena mempunyai posisi terendah pada survey TPLK yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada Siskamling Aktif yang harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil TPLK tahun 2017 di Kec. Kiaracondong yaitu :

1. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu Siskamling Aktif.
2. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada RW Juara.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Hampir seluruh RW telah memenuhi kriteria Sistem Keamanan Lingkungan aktif dengan adanya pengurus yang menunjang program kerja Siskamling Aktif.
2. Telah terbentuknya kelompok kerja Siskamling Aktif dengan jadwal yang terstruktur dan dilengkapi dengan buku kegiatan Siskamling.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (RW Juara) sebagai berikut :

1. Masih banyaknya kriteria-kriteria yang ditetapkan belum dilaksanakan di RW.
2. Masih banyak pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria RW Juara.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator TPLK disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Pemahaman masyarakat tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sudah dilaksanakan di setiap RW/kampung.



2. Sosialisasi yang intensif dari Kelurahan dan Kecamatan tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terus dilakukan.

Faktor Penghambat :

1. Keberadaan masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan (Individualis).
2. Karakteristik warga masyarakat , jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program kriteria Tingkat Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan penyusunan program, rencana aksi dan penetapan anggaran untuk menjawab agar tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ke depan jauh lebih baik.
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang program yang mendukung tercapainya pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria penilaian kegiatan tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.
3. Kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.



B. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong ditetapkan melalui Keputusan Camat Kiaracondong Nomor : 138/02a-Kec.Kircon Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018, sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80,00

Untuk memantau progress capaian dari indicator kinerja yang telah diperjanjikan menggunakan suatu KPI sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya dapat dijadikan pegangan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Target Kinerja Triwulan
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018

Q1				Q2				Q3				Q4			
Indikator	Target	Satuan	Keterangan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 1	85	Nilai		rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 2	85	Nilai		rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 3	85	Nilai		rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan TW 4	85	Nilai	
Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Program PIPPK	-	-		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi	85	sub kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi	170	sub kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi	255	sub kegiatan	
Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Program PIPPK	-	-		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	18	sub kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	36	sub kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	66	sub kegiatan	





Untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penjelasan formulasi/cara pengukuran disesuaikan dengan SK Menpan No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dimana terdapat 9 (sembilan) komponen yang menjadi nilai unsur pelayanan sebagai indikator penilaian di masing-masing wilayah.

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 indikator dengan 9 komponen yang menjadi nilai unsur per pelayanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Layanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dimana yang menjadi formulasi/cara pengukurannya berdasarkan persentase rata-rata RW Juara, Siskamling Aktif dan LKK Aktif. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas 3 unsur yang menjadi kriteria penilaian.

Kriteria unsur penilaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :

- d) Persentase RW Juara
- e) Siskamling Aktif
- f) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif



Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Triwulan II tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

MATRIKS EVIDENCE CAPAIAN REALISASI KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI) TRIWULAN II
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KIARACONDONG
TAHUN ANGGARAN 2018

TARGET KPI Q2					REALISASI TRIWULAN 2								
No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Parameter	Kecamatan Kiaracondong	Kel. Babakan Sari	Kel. Babakan Surabaya	Kel. Cicaheum	Kel. Kebon Jayanti	Kel. Kebon Kangkung	Kel. Sukapura	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rata rata hasil survei IKM Kecamatan dan Kelurahan TW II	85	Nilai	IKM se-Kecamatan Kiaracondong	82,73	90,35	84,01	85,34	89,84	90,10	86,14	86,93	102,27
2	Rata-rata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan TW II	80	%	TPLK se-Kecamatan Kiaracondong		100,00	95,56	91,67	85,71	90,91	82,22	91,01	113,76
	Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup RW yang direalisasi	85	Sub Kegiatan	RW									
				1	Penguatan Kelembagaan	18	0	2	0	2	0		
				2	Fisik dan Infrastruktur	10	0	7	0	0	0		
				3	Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	5	0	0	5	0		
				4	Keamanan dan Ketertiban	0	4	0	0	0	0		
				5	Kebersihan dan Penghijauan	0	3	0	0	0	0		
												56	65,88





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Jumlah Sub Kegiatan PIPPK Lingkup LKK yang direalisasi	18	Sub Kegiatan	PKK				19	105,56			
			1	Sub Kegiatan Pokja 1	0	1			0	0	0
			2	Sub Kegiatan Pokja 2	0	0			0	0	0
			3	Sub Kegiatan Pokja 3	0	0			0	0	1
			4	Sub Kegiatan Pokja 4	1	1			0	0	2
			KARANG TARUNA								
			1	Sub Kegiatan Kesekretariatan	1	0			1	0	2
			2	Sub Kegiatan Pelatihan Keterampilan	0	0			0	0	1
			3	Sub Kegiatan Kesenian	0	0			0	0	0
			4	Sub Kegiatan Kesenian	1	0			0	0	0
			5	Sub Kegiatan PerLomba Olahraga	0	0			0	0	0
			LPM								
			1	Sub Kegiatan Perencanaan	1	1			0	0	1
			2	Sub Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	0	0			0	0	0
			3	Sub Kegiatan monitoring dan Evaluasi Kewilayahan	0	0			0	0	1





LAPORAN CAPAIAN KINERJA UTAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2018

NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN/DATA KINERJA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Nilai	86,93	102,27 %	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Triwulan II = 86,93 , merupakan jumlah kumulatif IKM dibagi 7 dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan = 82,73 Kel. Babakan Sari = 90,35 Kel. Babakan Surabaya = 84,01 Kel. Cicaheum = 85,34 Kel. Kebon Kangkung = 90,10 Kel. Kebon Jayanti = 89,84 Kel. Sukapura = 86,14
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80	%	91,01	113,76 %	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Triwulan II = 91,01 % , merupakan jumlah rata2 % RW Juara + LKK Aktif dan Siskamling Aktif dengan rincian sebagai berikut : RW Juara = 88,73 % LKK Aktif = 100,00 % Siskamling Aktif = 84,30 %

1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar 86,93 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya mengalami kenaikan sebesar 1,93 point yaitu 102,27 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian hasil kinerja indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dimana dapat dilihat dari 9 (sembilan) komponen unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Kiaracondong dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Kiaracondong.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong selama Triwulan II tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong Triwulan II Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur
U1	Persyaratan	3,35
U2	Prosedur	3,34
U3	Waktu Pelayanan	3,37
U4	Biaya/Tarif	3,89
U5	Produk Layanan	3,41
U6	Kompetensi Pelaksana	3,43
U7	Perilaku Pelaksana	3,43
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,38
U9	Sarana dan Prasarana	3,72

Sumber : Kecamatan Kiaracondong

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada *Prosedur* karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah *Biaya/Tarif* harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kategori tertinggi dan terendah hasil IKM Triwulan II tahun 2018 di Kecamatan Kiaracondong yaitu :

1. Nilai kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur *Biaya/Tarif*.
2. Nilai kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur *Prosedur*.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi dari unsur *Biaya/Tarif* adalah sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Adanya media informasi yang jelas kepada masyarakat terhadap biaya yang akan dibebankan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat seperti spanduk, pamflet, koran/majalah dan media informasi lainnya.
3. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah dari unsur Prosedur adalah sebagai berikut :

1. Standar Prosedur Pelayanan (SPP) belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Kiaracondong.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, belum mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Dengan dimulainya tahun ajaran baru dimana pihak sekolah menyusun aturan tertentu pada saat penerimaan siswa baru mengenai ijin tinggal/domisili harus melampirkan Surat Keterangan tinggal menetap/domisili sebelum tahun 2018, masyarakat mendapat kesulitan untuk mengurus prosedur atau aturan yang berlaku sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Prosedur dan Persyaratan tertentu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka direkomendasikan / solusi / rencana aksi sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan IKM yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan, menindaklanjuti rencana aksi yang telah ditentukan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan ketidakpuasan pelayanan.



2. Kegiatan IKM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

2. Pencapaian Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Hasil kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar 91,01 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 11,01 % yaitu 113,76 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian hasil kinerja pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat dari 3 (tiga) kriteria unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Kiaracandong dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Kiaracandong. Ketiga kriteria tersebut diantaranya RW Juara, Siskamling Aktif, dan LKK Aktif.

Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Kiaracandong selama Triwulan II Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kiaracandong Triwulan II Tahun 2018

WILAYAH	KRITERIA							TPLK %
	RW JUARA			SISKAMLIN G AKTIF		LKK AKTIF		
	JML RW	JUARA	%	JML	%	JML	%	
BABAKAN SARI	18	18	100,00	18	100,00	3	100,00	100,00
BABAKAN SURABAYA	15	13	86,67	15	100,00	3	100,00	95,56



KEBON KANGKUNG	11	11	100,00	8	72,73	3	100,00	90,91
SUKAPURA	15	9	60,00	13	86,67	3	100,00	82,22
CICAHEUM	12	12	100,00	9	75,00	3	100,00	91,67
KEBON JAYANTI	14	12	85,71	10	71,43	3	100,00	85,71
TOTAL	85	75	88,73	73	84,30	18	100,00	91,01

Sumber : Kecamatan Kiaracondong

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Siskamling Aktif karena mempunyai posisi terendah pada survey Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada LKK Aktif yang harus tetap dipertahankan, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Triwulan II Tahun 2018 di Kecamatan Kiaracondong yaitu :

1. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu LKK Aktif.
2. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada Siskamling Aktif.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Hampir seluruh LKK di Kelurahan telah memenuhi kriteria penilaian LKK Aktif.
2. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan telah mempunyai rencana/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan ruang lingkup Kecamatan/Kelurahan.
3. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan telah melaksanakan program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan di ruang lingkup Kecamatan/Kelurahan masing-masing.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (Siskamling Aktif) sebagai berikut :

1. Masih ada kriteria Siskamling Aktif yang belum diterapkan ditingkat RW sehingga mempengaruhi penilaian Siskamling Aktif di masing-masing wilayah/Kelurahan, diantaranya :
 - Kelurahan Kebon Kangkung di RW 09.
 - Kelurahan Sukapura di RW 12 dan RW 14.
 - Kelurahan Kebon Jayanti di RW 03, RW 09, RW 13 dan RW 14.
2. Masih ada pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria Siskamling Aktif.

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar 91,01 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11,24 % atau capaian mengalami peningkatan sebesar 14, 09 % terhadap realisasi tahun 2017 dan bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata Triwulan I tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,48 % atau capaian mengalami peningkatan sebesar 1,65 % terhadap realisasi Triwulan I tahun 2018.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Pemahaman masyarakat tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sudah dilaksanakan di setiap RW/kampung.

2. Sosialisasi yang intensif dari Kelurahan dan Kecamatan tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terus dilakukan.
3. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di masing-masing Kelurahan.

Faktor Penghambat :

1. Keberadaan masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan (Individualis).
2. Karakteristik warga masyarakat , jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi / rencana aksi sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan menyusun program yang akan dilaksanakan, melaksanakan rencana aksi yang telah ditentukan dan memanfaatkan dana anggaran untuk menjawab agar tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ke depan jauh lebih baik.
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang program yang mendukung tercapainya pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria penilaian kegiatan tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.



3. Kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target IKU tercantum dalam RPJMD dan realisasinya ditentukan berdasarkan capaian pada setiap tahunnya. Perlu dimaklumi bahwa untuk tahun 2019 belum ada target IKU yang tercantum dalam RPJMD karena RPJMD Kota Bandung Tahun 2019 – 2023 belum tersusun. Oleh sebab itu untuk target IKU tahun 2019 diambil dari target tahun 2018 yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2017 – 2018 Hasil Reviu.

Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2017 mencakup telaahan terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja		Proyeksi Capaian Kinerja	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	- Output (Keluaran) - Outcome (Hasil)	98,32	82,00	83,00	85,00	80,00	82,09	83,11	100 %	100 %
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	- Output (Keluaran) - Outcome (Hasil)	NA	*	75,00	80,00	80,00	*	79,77	100 %	100 %





2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KIARACONDONG

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Kiaracondong dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Kiaracondong berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan Kecamatan Kiaracondong, yaitu permasalahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tingkat implementasi permasalahan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
2. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
3. Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kiaracondong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kiaracondong, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung antara lain :





1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong.

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
1	Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Kegiatan penguatan kelembagaan masih menjadi permasalahan dengan ditandai kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut dan berperan secara aktif pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat baru dimulai sejak tahun anggaran 2017 dan hanya pencapaiannya sebesar 71,76% dari total anggaran yang disediakan sebesar 395 juta.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
2	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat masih sedikit dijalankan oleh sebagian masyarakat yang menjadi sentra industri masyarakat. Sentra industri keramik merupakan salah satu yang menjadi andalan usaha ekonomi masyarakat yang terletak diwilayah kelurahan Sukapura dan belum ada lagi penambahan. Sebagian besar usaha ekonomi masyarakat terdiri atas perusahaan rumah tangga dan	Peningkatan perekonomian masyarakat wilayah Kecamatan dan Kelurahan



		rumah makan yang bersifat usaha milik perorangan. Kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan selama 4 (empat) tahun terakhir sampai dengan tahun 2017 mencapai 89,74 % dari total anggaran yang tersedia sebesar 212 juta selama 4 (empat) tahun anggaran.	
3	Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan dapat mengakibatkan tersendat dan terhambatnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Peran pelaksana kegiatan sangat penting untuk ditingkatkan dan optimalisasikan sehingga seluruh aktifitas dan pelaksana kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan sebelumnya.	Peningkatan pembinaan kinerja aparatur

Untuk menentukan prioritas berdasarkan isu strategis tersebut digunakan sejumlah kriteria sebagai bahan scoring (pembobotan) sehingga dapat ditentukan peringkat terhadap prioritas yang ditentukan. Kriteria yang digunakan adalah :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.



4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dengan menggunakan kriteria tersebut dilakukan pembobotan berdasarkan signifikansi isu terhadap penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Pembobotan berdasarkan kriteria tersebut dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	15 %
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	15 %
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	15 %
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15 %
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola	15 %
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25 %



2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Secara umum, kebijakan untuk merespon tantangan dan prospek perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, diantaranya meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan komoditas utama masyarakat; meningkatkan kerjasama penyediaan bahan pangan dengan lembaga/perusahaan pemasok bahan pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat; peningkatan peran Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan, dengan meningkatkan jumlah komunitas dan kluster IKM berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif.

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2017, proyeksi tahun 2018 dan 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019, merupakan rencana pada tahun pertama Kepala Daerah periode 2019 – 2023 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung tahap IV. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2019, fokus pada target kinerja periode RPJMD 2013 – 2018 yang belum tercapai serta permasalahan yang akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2019. Berdasarkan asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan diharapkan mampu memberi daya ungkit terhadap pembangunan di kewilayahan. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat dilihat dari hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD seperti dalam tabel berikut dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2019 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100 %	1.850.854.755	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	53.23 %	2.206.314.039	Program/Kegiatan lanjutan
1	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12 laporan	1.570.081.225	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Panjang Drainase terpelihara	- 22.760 m	1.809.511.732	Program/Kegiatan lanjutan
2	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Kecamatan Kiaracondong	- Luas RTH Kecamatan yang terpelihara	- 100 M2	253.195.178	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Kecamatan Kiaracondong	- Luas RTH Kecamatan terpelihara	- 420 M2	354.313.271	Program/Kegiatan lanjutan
3	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Kecamatan Kiaracondong	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000 M2	27.578.352	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Kecamatan Kiaracondong	- Panjang Kerb Bahu Jalan Terpelihara	- 700 M	42.489.036	Program/Kegiatan lanjutan
II	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tindak pidana	100 %	1.203.472.232	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tindak pidana	82.35 %	1.391.817.230	Program/Kegiatan lanjutan
1	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.203.472.232	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 70 RW	1.391.817.230	Program/Kegiatan lanjutan
III	Program Pemberdayaan Potensi	Kecamatan & Kelurahan Se-	- Persentase Jumlah Lembaga Kesejahteraan	91,66 %	496.848.029	Program Pemberdayaan Potensi	Kecamatan & Kelurahan Se-	- Persentase Jumlah Lembaga Kesejahteraan	50,00 %	562.753.800	Program/Kegiatan lanjutan





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kiaracondong	Sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan sosial			Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kiaracondong	Sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan sosial			
1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah kelompok / kader / lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	- Kader / Kelompok-Kelompok	496.848.029	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah kelompok / kader / lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	- 3 Kader / Kelompok-Kelompok	562.753.800	Program/Kegiatan lanjutan
IV	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	78 -	1.831.929.505	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	80 -	2.779.591.400	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	74.491.798	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 90,58 %	90.623.400	Rancangan awal RKPD
2	Kegiatan Pembinaan RT RW	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah RW RT yang mendapat Pembinaan	- 44 RT/RW %	1.757.437.707	Kegiatan Pembinaan RT RW	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah RW RT yang mendapat Pembinaan	- 593 RT / 85 RW	2.688.968.000	Janji Politik Wali Kota
V	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	54,54 %	10.300.000.000	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	95,71 %	10.286.119.708	Janji Politik Wali Kota
1	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	- 71 Sub Kegiatan	8.500.000.000	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	- 340 Sub Kegiatan	8.500.230.683	Janji Politik Wali Kota





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemberdayaan Lingkup PKK	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	- 8 Sub Kegiatan	600.000.000	Pemberdayaan Lingkup PKK	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	- 30 Sub Kegiatan	599.699.836	Janji Politik Wali Kota
3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- 9 Sub Kegiatan	600.000.000	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- 24 Sub Kegiatan	597.788.566	Janji Politik Wali Kota
4	Pemberdayaan Lingkup LPM	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	- 6 Sub Kegiatan	600.000.000	Pemberdayaan Lingkup LPM	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	- 18 Sub Kegiatan	588.400.623	Janji Politik Wali Kota
VI	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1 - 0,2 -	307.883.679	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1 - 0,2 -	439.967.000	Prioritas hasil analisis kebutuhan
1	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif - Pokjanel, Kader Posyandu Aktif	- Kader Posyandu - Kader-	307.883.679	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif - Pokjanel, Kader Posyandu Aktif	- Kader Posyandu - Kader-	439.967.000	Prioritas hasil analisis kebutuhan
VII	Pemberdayaan KUMKM	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15 -	44.986.381	Pemberdayaan KUMKM	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Koperasi dan UKM Aktif	33,33 %	74.596.000	Prioritas hasil analisis kebutuhan
1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah KUMKM aktif di wilayah Kecamatan / Kelurahan	- Usaha / kelompok orang	44.986.381	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah KUMKM aktif di wilayah Kecamatan / Kelurahan	- Usaha / kelompok orang	74.596.000	Prioritas hasil analisis kebutuhan





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 Nilai	1.845.404.985	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80 -	2.113.442.073	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bulanan	- 12 Jasa Bulanan	153.734.844	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bulanan	- 12 Jasa Bulanan	220.904.679	Rancangan awal RKPD
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 0 Unit	29.281.468	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 0 Unit	26.949.770	Rancangan awal RKPD
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Laporan	227.172.819	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Laporan	137.764.370	Rancangan awal RKPD
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki Bulanan	- 0 Unit	43.916.798	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki Bulanan	- 0 Unit	30.661.130	Rancangan awal RKPD
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK Bulanan	- 12 Laporan	74.738.555	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK Bulanan	- 12 Laporan	108.161.245	Rancangan awal RKPD
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	- 0 Jenis	91.391.864	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	- 0 Jenis	135.079.180	Rancangan awal RKPD





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bulanan	- 12 Laporan	11.476.408	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bulanan	- 12 Laporan	18.431.314	Rancangan awal RKPD
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 3 Laporan	86.028.670	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 3 Laporan	192.917.685	Rancangan awal RKPD
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulanan	- 12 Laporan	17.091.631	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulanan	- 12 Laporan	27.275.000	Rancangan awal RKPD
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bulanan	- 12 Laporan	24.350.504	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bulanan	- 12 Laporan	32.236.000	Rancangan awal RKPD
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Bulanan	- 12 Laporan	120.541.355	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Bulanan	- 12 Laporan	192.359.000	Rancangan awal RKPD
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bulanan	- 12 Laporan	144.653.845	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bulanan	- 12 Laporan	181.188.700	Rancangan awal RKPD
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Bulanan	- 12 Laporan	480.614.540	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Bulanan	- 12 Laporan	636.000.000	Rancangan awal RKPD





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Bulanan	- 12 Laporan	340.411.684	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Bulanan	- 12 Laporan	173.514.000	Rancangan awal RKPD
IX	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 Nilai	565.860.424	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80 -	1.051.593.007	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	- 0 Jenis	-	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	- 0 Jenis	58.982.973	Rancangan awal RKPD
2	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pengadaan Mebeulair	- 0 Unit	38.592.589	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pengadaan Mebeulair	- 0 Unit	121.466.159	Rancangan awal RKPD
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	63.347.375	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	238.296.850	Rancangan awal RKPD
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 0 Unit	339.848.668	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 0 Unit	619.035.280	Rancangan awal RKPD
5	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	- 1 gedung	124.071.793	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	- 1 gedung	13.811.745	Rancangan awal RKPD
X	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 Nilai	46.746.009	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80 -	37.607.500	Rancangan awal RKPD





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 0 Unit	24.353.100	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 0 Unit	30.907.500	Rancangan awal RKPD
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- 45 Stel	22.392.909	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- 45 Stel	6.700.000	Rancangan awal RKPD
XI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80 Nilai	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kiaracondong	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80 -	60.000.000	Rancangan awal RKPD
1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 0 Orang	-	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 0 Orang	60.000.000	Rancangan awal RKPD





2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung khususnya di kewilayahan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi maka arah kebijakan belanja berdasarkan pada prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2019.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas pengguna anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja tahun 2019 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja terbagi atas kebijakan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja langsung meliputi sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang



diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui aplikasi *e-musrenbang*.
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik pemerintah kota.
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.
10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.



Kebijakan belanja tidak langsung meliputi sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
3. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.
4. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Tujuan umum pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dengan mantapnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terwujudnya kesejahteraan warga masyarakat yang selaras, adil dan merata dalam pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya landasan yang mantap untuk pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun mekanisme kerja perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Nasional yang



melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam MUSRENBANG diharapkan peran aktif masyarakat untuk mendata permasalahan-permasalahan, kebutuhannya dan mencari jalan terbaik pemecahan masalah tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Kiaracondong bersama pemangku kepentingan se-Kecamatan Kiaracondong mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat Kecamatan Kiaracondong dan mencari alternatif pemecahan permasalahan secara bersama-sama dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kehadiran masyarakat pada acara MUSRENBANG Kecamatan Kiaracondong setiap tahunnya cukup baik dan sangat antusias. Berikut tingkat kehadiran MUSRENBANG tingkat Kecamatan Kiaracondong dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

**Kehadiran Pada Acara MUSRENBANG
Tingkat Kecamatan Kiaracondong
Tahun 2014 s/d Tahun 2018**

MUSRENBANG	Yang Diundang	Yang Hadir	Persentase Kehadiran
Tahun 2014	75	87	116 %
Tahun 2015	75	85	113 %
Tahun 2016	90	98	108 %
Tahun 2017	154	158	102 %
Tahun 2018	154	169	109 %

Sumber Tim Penyelenggara MUSRENBANG Kecamatan Kiaracondong



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Bandung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Keluaran Se-Kecamatan Kiaracondong	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		
1	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Cicaheum	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	3.453 M2	Perbaikan Jalan
				238 titik	Penerangan Jalan Umum
				100 M2	Ruang Terbuka Hijau
				6 titik	Air Bersih dan Sanitasi
				7 titik	Penanganan Banjir
				10 M2	Sarana Pendidikan Non Formal
2	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Babakan Surabaya	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	7.555 M2	Perbaikan Jalan
				504 titik	Penerangan Jalan Umum
				1.041 M2	Ruang Terbuka Hijau
				11 titik	Air Bersih dan Sanitasi
				48 M2	Sarana Prasarana Perumahan
3	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Kebon Kangkung	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	7.567 M2	Perbaikan Jalan
				158 titik	Penerangan Jalan Umum
				550 M2	Ruang Terbuka Hijau
				31 titik	Air Bersih dan Sanitasi





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

				6 titik	Penanganan Banjir
				226 M2	Sarana Prasarana Perumahan
				12 M2	Sarana Persampahan
4	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Babakan Sari	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	19.613 M2	Perbaikan Jalan
				551 titik	Penerangan Jalan Umum
				550 M2	Ruang Terbuka Hijau
				31 titik	Air Bersih dan Sanitasi
				2.510 M2	Peningkatan Jalan Lingkungan
				8 titik	Penanganan Banjir
				138 M2	Sarana Prasarana Perumahan
5	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Kebon Jayanti	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	980 M2	Perbaikan Jalan
				112 titik	Penerangan Jalan Umum
				240 M2	Ruang Terbuka Hijau
				21 titik	Air Bersih dan Sanitasi
				48 M2	Prasarana Sekolah
				10 titik	Penanganan Banjir
				68 M2	Sarana Prasarana Perumahan
				50 M2	Sarana Pendidikan Non Formal
6	Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Sukapura	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	16.105 M2	Perbaikan Jalan
				215 titik	Penerangan Jalan Umum
				512 M2	Ruang Terbuka Hijau
				6 titik	Air Bersih dan Sanitasi





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

				72 M2	Prasarana Sekolah
				2 titik	Penanganan Banjir
				372 M2	Sarana Prasarana Perumahan
				36 M2	Sarana Pendidikan Non Formal
				575 M2	Peningkatan Jalan Lingkungan
				59 M2	Sarana Persampahan





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Masa berlaku RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan wali kota pada akhir tahun 2018, sementara itu, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dimulai pada bulan Desember 2017, dimana belum terdapat dokumen RPJMD periode 2019 – 2023 yang seharusnya menjadi acuan penyusunan RKPD. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 pada pedoman transisi ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. Perubahan RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1), antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja RPJMD periode 2013 – 2018, permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD, serta kajian analisis skala prioritas dan masalah pembangunan yang telah disepakati oleh unsur-unsur bidang dalam lingkup Bappelitbang Kota Bandung dan perangkat daerah terkait. Hal ini berarti bahwa program yang telah ada di RPJMD Kota Bandung 2013 – 2018 masih dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019, dengan fokus pada program yang belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap NAWACITA, SDG's, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sector/bidang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi :

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kiaracondong;

Indikator Tujuan :

- Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode eke IV. Adapun uraian tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2019 khususnya perangkat daerah di wilayah Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :



**Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung Tahun 2019**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran 2019	PD Pengampu
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	B	A	Seluruh Perangkat Daerah





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademis yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2019.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;

- c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2019 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global, seperti SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan pemenuhan SPM (*Standar Pelayanan Minimal*).
 4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD



ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2018.

Secara rinci rumusan rincian proyeksi belanja perangkat daerah dan program prioritas perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong beserta ringkasan anggarannya dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2019

No	SKPD	Rincian	Rincian Belanja 2019
1	Kecamatan Kiaracondong	Belanja Tidak Langsung	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.845.311.753,38
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.318.127.696,08
		Belanja Langsung	21.003.801.757,00
		Total	34.167.241.206,46

Ringkasan Anggaran Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019				Jumlah
		Program Prioritas		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Penunjang	
		Program	Anggaran			
1	Kecamatan Kiaracondong	Program Pemberdayaan Kewilayahan	10.286.119.708	7.455.039.469	3.262.642.580	21.003.801.757



Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang disusun dengan menggunakan matrik program dan kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Kinerja Capaian Program;
- Besaran Dana yang Dibutuhkan;
- Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam hal ini Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong pada Tahun 2019 disertai dengan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.26 Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 21.003.801.757

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	53,23 %	2.206.314.039	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	58,84 %	2.426.945.443	
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang drainase terpelihara	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 22.760 m	1.809.511.732	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 23.360 m	1.990.462.905





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH Kecamatan terpelihara	Kecamatan Kiaracondong	- 420 M2	354.313.271	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 420 M2	389.744.598
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Kecamatan Kiaracondong	- 700 M	42.489.036	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 700 M	46.737.940
1	5			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1	5	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tindak pidana	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	82.35 %	1.391.817.230	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	83.53 %	1.530.998.953
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 70 RW	1.391.817.230	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 71 RW	1.530.998.953
1	6			Sosial								
1	6	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	- Persentase Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ikut berperan	Kecamatan & Kelurahan Se-	50,00 %	562.753.800	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	50,00 %	619.029.180





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		aktif dalam penyelenggaraan sosial	Kecamatan Kiaracondong									
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok / kader / lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 3 Kader / Kelompok	562.753.800	Pendapatan Asli Daerah	Program/ Kegiatan lanjutan	- 3 Kader / Kelompok	619.029.180
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	6	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	80 -	2.779.591.400	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	80,10	3.057.550.540
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90,58 %	90.623.400	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 90,58 %	99.685.740
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RW RT yang mendapat Pembinaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 593 RT/ 85RW	2.688.968.000	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 593RT/ 85RW	2.957.864.800





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	7	25	Program Pemberdayaan Kewilayahan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	95,71 %	10.286.119.708	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	95,75 %	11.314.731.679	
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 340 Sub Kegiatan	8.500.230.683	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 340 Sub Kegiatan	9.350.253.751
2	7	25	2	Pemberdayaan Lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 30 Sub Kegiatan	599.699.836	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 30 Sub Kegiatan	659.669.820
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 24 Sub Kegiatan	597.788.566	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 24 Sub Kegiatan	657.567.423
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 18 Sub Kegiatan	588.400.623	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 18 Sub Kegiatan	647.240.685
2	7	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan & Kelurahan Se-	1 -	439.967.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 -	483.963.700





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
		- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Kiaracondong	0,2 -				0,2 -					
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif - Pokjanal, Kader Posyandu Aktif	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Kader Posyandu - Kader-	439.967.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- Kader Posyandu - Kader-	483.963.700	
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah									
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	- Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong		33,33 %	74.596.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	33,33 %	82.055.600
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	- Jumlah KUMKM aktif di wilayah Kecamatan / Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 2 Usaha / kelompok orang	74.596.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 2 Usaha/ kelompok orang	82.055.600	
4				Urusan Penunjang									
4	5			Fungsi Penunjang Lainnya									





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	80 -	2.113.442.073	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	80,10	2.324.786.280
4	5	1	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Jasa Bulanan	220.904.679	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Jasa Bulanan	242.995.147
4	5	1	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Unit	26.949.770	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 Unit	29.644.747
4	5	1	8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	137.764.370	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Laporan	151.540.807
4	5	1	9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Unit	30.661.130	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 Unit	33.727.243





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 5 1 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	108.161.245	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 12 Laporan	118.977.370
4 5 1 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Jenis	135.079.180	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 0 Jenis	148.587.098
4 5 1 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	18.431.314	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 12 Laporan	20.274.445
4 5 1 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 3 Laporan	192.917.685	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 3 Laporan	212.209.454
4 5 1 14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	27.275.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 12 Laporan	30.002.500





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	32.236.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Laporan	35.459.600
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	192.359.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Laporan	211.594.900
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bulanan	Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	181.188.700	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Laporan	199.307.570
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Bulanan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	636.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Laporan	699.600.000
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Bulanan	Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	173.514.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 12 Laporan	190.865.400





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	80 -	1.051.593.007	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	80,10	1.156.752.308
4 5 2 7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Jenis	58.982.973	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 0 Jenis	64.881.270
4 5 2 10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan Mebeulair	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Unit	121.466.159	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 0 Unit	133.612.775
4 5 2 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 Laporan	238.296.850	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 12 Laporan	262.126.535
4 5 2 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Unit	619.035.280	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 0 Unit	680.938.808
4 5 2 42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 1 gedung	13.811.745	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPDP	- 1 gedung	15.192.920





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	5	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	80 -	37.607.500	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	80,10	41.368.250
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 Unit	30.907.500	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 Unit	33.998.250
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 45 Stel	6.700.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 45 Stel	7.370.000
4	5	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Kiaracondong	80 -	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	80,10	66.000.000
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Kiaracondong	- 0 Orang	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan awal RKPD	- 0 Orang	66.000.000





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kiaracondong yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Program-program dan indikasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renja ini tidak hanya menjabarkan rencana kegiatan yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Program dan Kegiatan pada tahun 2019 yang tidak dapat di akomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 di wilayah Kecamatan Kiaracondong.

Bandung, 11 Juni 2018

CAMAT KIARACONDONG

KECAMATAN
KIARACONDONG

Drs. TARYA

Pembina Tk. I

NIP. 19660622 198703 1 004

